

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gereja merupakan tempat berdoa atau rumah ibadah orang kristiani dan merupakan persekutuan umat yang melakukan upacara keagamaan tentang kepercayaan, ajaran dan tata cara yang sama yang dimaknai sebagai persekutuan umat yang percaya akan Yesus Kristus. Jika dibandingkan dengan kepercayaan lain, Gereja Katolik memiliki ciri khusus yaitu bersifat sentralistik dimana gereja menunjuk pada institusi yang dipimpin secara hierarkis oleh seorang Paus bersama para Uskup dan Imam. Misi utama gereja sebenarnya bukanlah dalam tatanan politik, ekonomi, atau sosial, melainkan pada tatanan kerohanian, namun hal ini tidak berarti bahwa Gereja Katolik acuh terhadap masalah sosial-politik.

Gereja Katolik hadir tidak melayani diri sendiri dan tertuju pada kepentingan diri sendiri, melainkan mengemban tujuan dasar kasih yang terarah pada manusia, sehingga terlibat dalam situasi sosial-politik bukan untuk mempromosikan dirinya, melainkan berorientasi pada pelayanan kasih. Salah satu dokumen yang memberikan refleksi antara gereja dan politik adalah merujuk pada dokumen Konsili Vatikan ke- II yaitu *Gaudium et Spes* (Kegembiraan dan Harapan) tentang martabat manusia dan pentingnya keterlibatan dalam politik. Dokumen resmi ini dikeluarkan secara mendalam mengenai hakikat dan tujuan politik yang berpusat pada “kepentingan umum“ dalam konteks masyarakat yang pluralis. Maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan Gereja Katolik secara tidak langsung dimotivasi oleh visi moral dan spiritual tentang manusia.

Gereja Katolik secara institusional melalui hierarki dan kaum religiusnya terlibat dalam kehidupan sosial-politik adalah untuk melakukan pendidikan politik yang berlandaskan Ajaran Kristiani yaitu kasih dengan tujuan utamanya adalah bukan untuk merebut kekuasaan dan kehormatan melainkan untuk mendalami nilai-nilai dasar yang diusung dari dimensi sosial imannya yang tentunya untuk kepentingan bersama. Gereja terikat

dengan semua kondisi yang membatasi organisasi kemanusiaan pada umumnya¹. Gereja juga hadir sebagai tempat untuk mengedukasi umatnya untuk peduli terhadap bangsa dan negaranya.

Gereja Katolik Indonesia selama ini dipandang lamban dalam merespon perkembangan politik serta dianggap pasif dalam menyikapi dan mengikuti dinamika kehidupan politik bangsa dan negara pada masa orde baru. Sikap gereja ini merupakan jawaban atas kekecewaan terhadap kehidupan politik masa orde baru yang cenderung membawa perubahan berarti bagi demokrasi khususnya kemerosotan moral bangsa.

Adanya ketidakadilan, kekerasan, perampasan, perusakan rumah-rumah ibadat oleh kelompok tertentu, peristiwa bom dan teror, menguatnya arus sektarianisme, radikalisme, sikap-sikap intoleransi agama, munculnya gerakan-gerakan dari kelompok radikal yang bernafaskan ideologi suatu agama, semakin melemahnya kohesi atau kerekatan sosial masyarakat yang diakibatkan oleh politik sektarian, adanya upaya sistematis yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang dengan sengaja ingin mengaburkan dan mengganti Pancasila dengan ideologi bukan Pancasila membuat Gereja Katolik mengambil sikap atas permasalahan yang terjadi.

Keterlibatan Gereja Katolik dalam hal politik dipandang tabu oleh sebagian masyarakat, sebab bukan ranah Gereja untuk terlibat dalam politik, namun Gereja akan bertindak jika berhadapan dengan situasi manusia yang menderita dan dihina. Dalam Ensiklik *Sollicitudo Rei Socialis* yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II tertanggal 30 Desember 1987, tentang perkembangan atau pembangunan yang sejati mengedepankan bahwa dalam situasi tertentu Gereja Katolik mengambil sikap terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat misalnya terhadap situasi pada zaman orde baru, dimana terjadi kemerosotan moral, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi yang merajalela turut mewarnai dinamika politik yang terjadi pada Era Orde Baru ini membuat Gereja

¹ Adolf Heuken, *Ensiklopedi Gereja* Jilid Ii: C – G, Jakarta:Yayasan Cipta Loka Caraka, 2004, Hlm.182.

Katolik Indonesia memberanikan diri untuk mengambil sikap dengan dikeluarkannya Surat Gembala Prapaskah oleh KWI pada bulan Maret 1997 yang bertajuk : “*Keprihatinan dan Harapan*”. Surat Gembala ini berisi tentang sikap gereja katolik terhadap segala peristiwa politik keagamaan yang berlangsung di tahun 1996 yang merupakan sebuah bentuk resistensi Gereja Katolik terhadap Rezim Soeharto pada masa itu.

Dinamika sosial politik masyarakat begitu dinamis, terkadang membuat sebagian masyarakat menjadi bingung, tidak peduli (apatis), bahkan tidak percaya lagi terhadap situasi sosial politik kemasyarakatan serta dikhawatirkan masyarakat cenderung golput pada pelaksanaan pemilu sebagai bagian dari pelaksanaan demokrasi yang terjadi di Indonesia. Pemilu dianggap sebagai ajang untuk pergantian pemimpin secara politik dimana masyarakat memainkan peranan secara khusus dengan terlibat dalam mengambil langkah sebagai pemilih, namun terkadang pemilu justru dijadikan sebagai sebuah hal yang biasa atau bahkan dianggap sebagai hal yang tidak penting oleh sebagian masyarakat.

Dalam Pemilu Serentak pertama pada Tahun 2019 yang merupakan pemilu yang dengan sistem pemilihan yaitu 5 (lima) surat suara untuk memilih Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota, dan DPD RI. Perlu disadari bahwa pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019 merupakan hal pertama dan baru bagi masyarakat Indonesia, yang dinilai sangat sulit dan membingungkan. Dalam pelaksanaannya pun banyak terjadi persoalan serta polemik yang terjadi, mulai dari politik identitas, kesadaran masyarakat yang minim akan pemilu, masyarakat yang tidak mengetahui calon legislatif, masyarakat yang tidak peduli dan apatis, hingga masalah hoaks yang berkembang turut mewarnai pemilu serentak tahun 2019.

Fenomena-fenomena politik dalam pemilu Tahun 2019 yang terjadi di masyarakat, tak membuat gereja katolik sebagai sebuah institusi menutup mata, diam dan tidak peduli melainkan mengambil peran dan langkah serta sikap politik dengan upaya terlibat menanggapi perkembangan situasi sosial

politik dinegara ini dan memerangi segala isu-isu yang terjadi dikalangan masyarakat dengan mempersiapkan umatnya untuk cinta akan tanah air dan bangsa dengan menjadi pemilih yang beriman, cerdas dan bijaksana.

Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang (KAS) yang merupakan Gereja Katolik yang menjadi pilar dan poros utama serta barometer bagi perkembangan Gereja Katolik di Indonesia, mencoba untuk mengambil Langkah dan sikap dalam menyongsong pemilu serentak tahun 2019. Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang (KAS) secara historis merupakan cikal bakal berkembang dan berdirinya Gereja Katolik pertama di Indonesia dengan Uskup pertamanya, Mgr. Albertus Soegijapranata.

Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang (KAS) memiliki peran untuk merevitalisasi nilai-nilai Pancasila dan semangat kebangsaan dikalangan umat katolik menjelang Pemilu Tahun 2019. Pendidikan Politik secara khusus dipilih oleh Gereja Katolik KAS sebagai jalan dan upaya untuk melakukan penyadaran serta mengedukasi umat katolik untuk memahami, mencintai, dan memiliki rasa tanggungjawab serta kesadaran yang tinggi terhadap bangsa dan negara dengan turut aktif dalam upaya membentuk moralitas politik umat, serta memperjuangkan kepentingan politisnya sebagai bagian dari masyarakat.

Atas dasar ingin membangun moralitas politik pada umat Katolik, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang (KAS) sebagai sebuah institusi bersinergi bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mewujudkannya dalam langkah yang konkret yaitu terlibat aktif dalam pemilu dengan melakukan pendidikan politik kepada umat katolik secara khusus dengan tujuan mewujudkan kesadaran umat katolik untuk ikut ambil bagian dalam pemilu, berperan aktif menyukseskan seluruh proses pelaksanaan pemilu dengan rasa tanggungjawab, mewujudkan kesadaran umat katolik sebagai warga negara khususnya dalam menentukan pilihan dibidang politik agar selalu mendasarkan pada hati nurani dan perwujudan iman kristiani.

Pendidikan politik yang dilakukan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang (KAS) dilandasi semangat Uskup Agung pertama di Indonesia yaitu Mgr. Albertus Soegijapranata dengan semboyannya “100% Katolik, 100% Indonesia”, dan juga sejalan dengan visi misi gereja katolik sebagai sebuah institusi yaitu menciptakan “*Bonum Commune*” yang berarti Gereja Katolik menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Gereja Katolik memandang pemilu sebagai sarana penting dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hal ini juga disampaikan Mgr. Robertus Rubiyatmoko, Pr selaku Uskup di Keuskupan Agung Semarang mengambil langkah dengan mengeluarkan Surat Gembala, pada tanggal 5 Februari 2019 dengan tema “*Jadilah Pemilih Beriman, Cerdas, Dan Bijaksana Sebagai Perwujudan Rasa Cinta Tanah Air Indonesia*”² dan Nota Pastoral yang berisi tentang seruan untuk merevitalisasi nilai – nilai Pancasila yang merupakan pernyataan sikap gereja tentang keprihatinan dan harapan bagi bangsa Indonesia³. Hal ini menunjukkan bahwa Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang (KAS) mendorong umat katolik untuk berperan serta dan memiliki kesadaran penuh serta tanggungjawab moral terhadap bangsa dan negara dengan berpartisipasi menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara Indonesia.

Peneliti memilih Kota Semarang sebagai lokasi penelitian karena Kota Semarang memiliki nilai historis tersendiri yang tak terlepas dari sejarah pembentukan Keuskupan Agung Semarang dan sebagai tempat berdirinya gereja Induk Keuskupan Agung Semarang berada di Kota Semarang. Jika kita menelisik lebih dalam, Kota Semarang memiliki keunggulan tersendiri yaitu bahwa Kota Semarang menjadi tempat atas terbentuknya Vikariat Apostolik Semarang pada 01 Agustus 1940 oleh Paus

² Surat Gembala Uskup Keuskupan Agung Semarang, Tahun 2019 : Menyambut Pemilihan Umum 17 April 2019, *Jadilah Pemilih Beriman, Cerdas, Dan Bijaksana sebagai Perwujudan Rasa Cinta Tanah Air Indonesia*. Semarang (05 Februari 2019)

³ Nota Pastoral adalah sebuah catatan pastoral atau pengembalaan tentang suatu topic yang perlu diperdalam dan didiskusikan bersama oleh umat dalam rangka pembelajaran bersama.

Pius XII dengan ditahbiskannya uskup pertama pribumi yaitu Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ pada 06 November 1940 di Gereja Randusari Semarang, dengan terbentuknya Vikariat Apostolik Semarang inilah awal Gereja Katolik Indonesia mulai berkembang dan terbentuklah Hierarki Gereja Katolik Indonesia.

Hierarki Episkopal Gereja Katolik Indonesia diresmikan berdasarkan *bulla* dari propaganda Fide, tertanggal 3 Januari 1961, berjudul “*Quod Christus Adorandus*” yang ditandatangani oleh Prefeknya, Gregorius P. Card. Agagianian, pada tahun ketiga masa kepemimpinan Paus Yohanes XXIII. Dengan demikian maka, Vikariat Apostolik Semarang berubah nama menjadi Keuskupan Agung Semarang dengan Mgr. Albertus Soegijapranata, SJ sebagai Uskup Agung yang pertama.

Keuskupan Agung Semarang terbagi atas 4 kevikapan (wilayah administratif) yaitu Kevikapan Semarang, Kevikapan Kedu, Kevikapan Surakarta dan Kevikapan Yogyakarta dengan jumlah total paroki sebanyak 102 paroki yang tersebar di empat Kevikapan. Cakupan Kevikapan Semarang sendiri meliputi Kota Semarang, Kabupaten Kendal, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati, dan Kab. Jepara serta Kab. Demak.

Kota Semarang yang merupakan cakupan wilayah yang masuk di Kevikapan Semarang menjadi tempat strategis sebab menjadi pusat untuk perkembangan umat Katolik Keuskupan Agung Semarang sebab kantor-kantor pelayanan Keuskupan terpusat di Kota Semarang dan tempat induk Gereja Keuskupan Agung Semarang dimana Kota Semarang menjadi domisili dari seorang Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang. Kota Semarang pada tahun 2018 memiliki 13 Paroki yang tersebar secara merata di beberapa wilayah Kota Semarang seperti berikut :

Tabel 1.1
Cakupan Wilayah dan Data Umat Gereja Katolik Tahun 2018
di Kota Semarang

NO	NAMA GEREJA KATOLIK	Cakupan Wilayah Semarang	Jumlah Umat Katolik	
			01 Januari 2018	31 Desember 2018
1	Gereja St. Maria Fatima Banyumanik	Kecamatan Banyumanik	5.683	5.751
2	Gereja St. Athanasius Agung Karangpanas	Kecamatan Candisari	7.289	7.144
3	Gereja St. Familia Admodirono	Kecamatan Semarang Selatan	3.979	3.968
4	Gereja Mater Dei lampersari	Kecamatan Semarang Selatan	2.274	2.264
5	Gereja St. Petrus Sambiroto	Kecamatan Tembalang	4.739	4.850
6	Gereja St. Paulus Sendangguwo	Kecamatan Pedurungan	7.671	7.747
7	Gereja St. Fransiskus Xaverius Kebondalem	Kecamatan Semarang Tengah	2.376	2.398
8	Gereja St. Yusuf Gedangan	Kecamatan Semarang Timur	6.043	6.079
9	Gereja St. Maria Ratu Rosario Suci Randusari	Kecamatan Semarang Selatan	6.017	6.048

10	Gereja St. Theresia Bongsari	Kecamatan Semarang Barat	7.294	7.441
11	Gereja St. Ignatius Krapyak	Kecamatan Semarang Barat	2.041	2.071
12	Gereja St. Mikael Semarang Indah	Kecamatan Semarang Barat	2.570	2.656
13	Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Tanah Mas	Kecamatan Semarang Utara	2.935	2.923
JUMLAH TOTAL			60.911	61.340

Sumber : Bagian Statistik Keuskupan Agung Semarang, 2020

Tabel diatas menunjukkan Data Jumlah Umat Katolik di Kota Semarang pada tahun 2018 yang mencapai 61.340 jiwa di tiga belas paroki se-Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk menulis skripsi dengan judul “Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu Tahun 2019”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang dianggap penting dengan maksud agar penulis memperoleh gambaran yang jelas terhadap masalah yang akan penulis bahas. Adapun rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam pendidikan politik umat menjelang Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang ?

2. Bagaimana strategi dan bentuk pendidikan politik umat yang dilakukan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang menjelang Pemilu Tahun 2019 di Kota Semarang ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam pendidikan politik umat menjelang Pemilu tahun 2019 di wilayah Kota Semarang.
2. Menganalisis strategi dan bentuk pendidikan politik umat yang dilakukan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam menjelang Pemilu tahun 2019 di wilayah Kota Semarang.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi berupa pengetahuan dan keilmuan khususnya kajian tentang analisis Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam Pendidikan Politik Umat Menjelang Pemilu tahun 2019 di wilayah Kota Semarang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menerapkan segala ilmu yang telah diperoleh selama belajar di Universitas Diponegoro.

2. Bagi Universitas Diponegoro

Menambah referensi dan literatur perpustakaan FISIP Universitas Diponegoro, serta bermanfaat untuk dapat dijadikan kajian lebih lanjut bagi mahasiswa Universitas Diponegoro.

1.5. Kerangka Teori

1.5.1. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi dari penelitian ini, maka peneliti mencantumkan dua penelitian terkait, sebagai berikut.

1. Skripsi yang berjudul “*Peranan Gereja Katolik Roma-Timor Leste Dalam Politik Self Determination Timor Leste*)” karya Cipriano Costa Quarens Mauquolar, mahasiswa Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, FISIP Universitas Malang tahun 2013. Cipriano Costa Quarens Mauquolar menarik kesimpulan bahwa Gereja Katolik Roma berperan penting dalam politik terutama dalam self determination dengan terlibat dalam melakukan pendidikan politik bagi umatnya.
2. Skripsi yang berjudul “*Pendidikan Politik Hubungannya Dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015*” karya Kamaluddin, mahasiswa Sarjana Ilmu Politik, UIN Alauddin Makassar yang menarik kesimpulan bahwa dinamika yang terjadi di masyarakat ditentukan oleh berbagai macam aspek seperti aspek ekonomi, politik, juga pengaruh sektor atau karismanya, sementara penyebab rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat Desa Labuaja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros pada pilkada serentak 2015 Desa Labuaja yang disebabkan oleh persoalan teknis, kurangnya kesadaran masyarakat, pertimbangan ekonomi, merasa apatis dan pesimis, dan tidak ada di tempat pada saat pemilihan berlangsung.
3. Skripsi yang berjudul “*Proses Sosialisasi Dan Pendidikan Politik Pada Pemilihan Bupati Dan Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 (Studi Di Kecamatan Pardasuka Dan Kpud Pringsewu*” karya Muchamad Nurcholis, mahasiswa Sarjana Ilmu Pemerintahan, Universitas Lampung, yang menarik kesimpulan bahwa Sosialisasi Politik merupakan bagian dari pendidikan politik, dimana pemilih pemula diajarkan untuk lebih memahami tentang pendidikan politik secara mendalam agar mereka mempunyai rasa tanggung jawab untuk

memilih dan tidak acuh pada Pemilihan Umum untuk menentukan nasib Provinsi Lampung 5 tahun kedepan.

1.5.2. Teori Pendidikan Politik

Pendidikan adalah proses yang dilakukan secara sengaja untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri seseorang agar mereka memiliki kemampuan dalam menanggapi lingkungan secara positif atau melakukan perubahan (pengetahuan, sikap, dan perilaku) yang bermakna bagi dirinya, masyarakat, dan lingkungannya. Sementara politik adalah studi yang memusatkan perhatian pada masalah - masalah kekuasaan dalam kehidupan bersama atau masyarakat. Sehingga pendidikan politik merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa, yang diarahkan pada upaya membina kemampuan individu untuk mengaktualisasikan diri sebagai pribadi yang bebas otonom dan mengembangkan dimensi sosialnya dalam kaitan dengan kedudukannya sebagai warga negara. Holdar and Zakharchenko, menyebut pendidikan politik sebagai pendidikan publik (*public education*), yaitu upaya pelibatan warga negara dalam suatu komunitas untuk menciptakan budaya partisipasi.

Pendidikan Politik sering disebut dengan istilah political forming atau politische bildung. Forming mengandung makna bahwa pendidikan politik di dalamnya terkandung intensitas untuk membentuk insan politik yang menyadari status dan kedudukan politiknya di tengah masyarakat, sedangkan bildung terkandung sebuah makna bahwa pendidikan politik adalah pendidikan diri sendiri, menyangkut aktivitas membentuk diri sendiri dengan kesadaran penuh tanggung jawab untuk menjadi insan politik. Selain itu pendidikan politik juga dimaknai sebagai usaha untuk membentuk manusia menjadi partisipan yang bertanggung jawab dalam politik dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif, dengan terlibat memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya yang mengantarkan kepada perubahan menuju yang lebih baik.

Pendidikan politik dalam konteks Indonesia, diarahkan pada pencapaian cita-cita bangsa. Sebagaimana dikemukakan *Affandi*, pendidikan politik diselenggarakan untuk memberikan pedoman bagi generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara sejalan dengan arah dan cita-cita bangsa. Generasi muda sebagai sasaran pendidikan politik dituntut berpartisipasi aktif dalam pembangunan bangsa dan negara. Untuk itu, generasi muda harus memiliki pengetahuan dan keterampilan politik yang memadai, agar dengan kemampuan yang dimilikinya tersebut ia dapat berpolitik secara bertanggung jawab.

Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. *Huntington* dalam jurnal Nasiwan mendefinisikan partisipasi politik sebagai kegiatan warga negara (*private citizen*) yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Definisi ini mensyaratkan bahwa yang tercakup dalam partisipasi politik adalah kegiatan, dengan demikian orientasi-orientasi para warga negara terhadap politik, pengetahuan tentang politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai politik kompetisi dan keefektifan politik, persepsi-persepsi tentang relevansi politik, itu seringkali juga tidak berkaitan. Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan.

1.5.3. Teori Kelompok Kepentingan (Interest Group Theory)

Kelompok kepentingan (*interest group*) merupakan kelompok terorganisasi yang memiliki tujuan bersama yang secara aktif berusaha mempengaruhi pemerintahan dalam proses pengambilan kebijakan agar sesuai dengan keinginan kelompok yang diwakilinya. Kekuatan kelompok kepentingan berasal dari status keanggotaan, sumber daya manusia dan ketersediaan dana serta jaringan yang memadai. Kelompok-kelompok

kepentingan seringkali menjadi penentu agenda, penggalang isu, penyebar gagasan, perumus kebijakan, serta pendesak kepada pemerintah.

Gabriel A. Almond dan Bingham G. Powell dalam bukunya *Comparative Politics Today: A World View (1992)* seperti yang dikutip dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik (hlm. 387 - 388) membagi kelompok kepentingan menjadi empat kategori, yakni: Kelompok Anomik, Kelompok Non Assosiasional, Kelompok Institusional, dan Kelompok Assosiasional, Dalam hal ini, kelompok kepentingan institusional memiliki budaya kerja yang tidak menggunakan tekanan-tekanan ataupun paksaan, tetapi melalui hubungan secara personal (*lobbying*) dan melalui jaringan kerja (*networking*) yang intensif tetapi juga persuasif.

Berdasarkan uraian diatas, Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang merupakan kelompok kepentingan institusional dimana gereja katolik merupakan lembaga yang secara formal memiliki kepentingan untuk melakukan pendidikan politik kepada umat dengan mendorong umat untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak dan benar serta memiliki visi dan misi bersama yaitu mencapai apa yang disebut dengan “*bonnum comune*” yang memiliki arti bahwa gereja katolik harus menciptakan kebaikan dan kesejahteraan bersama.

Kewajiban untuk membangun moralitas dan kesadaran umat akan pemilu serentak Tahun 2019 di Kota Semarang merupakan tanggungjawab Gereja Katolik KAS dengan tujuan untuk mendorong umat katolik untuk ikut ambil bagian, berperan aktif menyukseskan seluruh proses pelaksanaan pemilu dengan rasa tanggungjawab, dan mewujudkan kesadaran umat katolik sebagai warga negara khususnya dalam menentukan pilihan dibidang politik agar selalu mendasarkan pada hati nurani dan iman kristiani, memberikan pemahaman/pengetahuan kepada umat Katolik tentang format baru pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

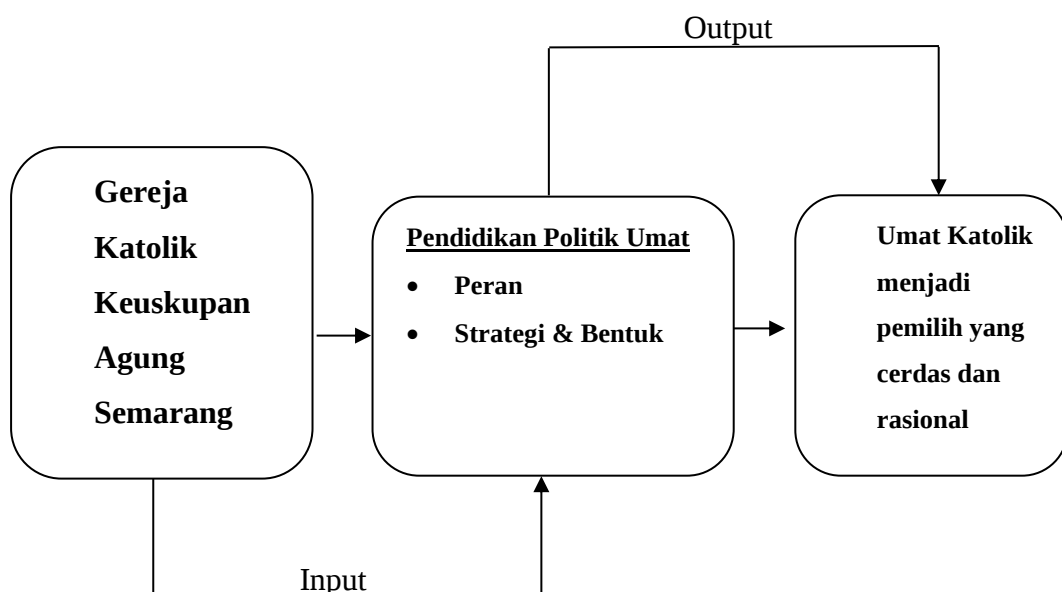
1.5.4. Kerangka Berpikir

Peneliti memulai kerangka pemikiran dalam penelitian ini dengan mengidentifikasi objek penelitian terlebih dahulu. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Gereja Katolik di Kesukupan Agung Semarang.

Teori utama dalam penelitian ini adalah teori kelompok kepentingan (*Interest Group Theory*) dimana Gereja Katolik memainkan peranan penting dan memiliki kepentingan politis untuk mengajak umatnya untuk memiliki rasa cinta terhadap bangsa dan negara dengan terlibat dan berpartisipasi menggunakan hak politiknya pada pemilu serentak tahun 2019. Dengan demikian pendidikan politik yang dilakukan Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang oleh berupaya untuk mengajak umat katolik agar dapat memiliki kesadaran politik sebagai warga negara dengan tujuan menjadi pemilih yang cerdas dan rasional. Berikut merupakan kerangka berpikir pendidikan politik yang dilakukan oleh Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang :

Bagan 1.1

Bagan Pendidikan Politik Umat Katolik



Sumber: Diolah oleh Peneliti 1 tahun

1.6. Operasionalisasi Konsep

Konsep utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1.6.1. Gereja Katolik sebagai Kelompok Kepentingan (Interest Group)

Gereja Katolik adalah institusi keagamaan yang memiliki peran sebagai kelompok kepentingan termasuk peran dalam pendidikan politik umat dalam konteks demokrasi kepemiluan, gereja katolik memiliki peran dalam mengembangkan kesadaran umat katolik untuk ikut ambil bagian sebagai warga negara khususnya dalam menentukan pilihan dibidang politik agar selalu mendasarkan pada hati nurani dan iman kristiani, berperan aktif menyukseskan seluruh proses pelaksanaan pemilu dengan rasa tanggungjawab, memberikan pemahaman/ pengetahuan kepada umat katolik tentang format baru pelaksanaan pemilu serentak tahun 2019.

1.6.2. Pendidikan Politik

Pendidikan Politik secara umum adalah mengembangkan kesadaran politik umat katolik sebagai warga negara melalui kelompok kepentingan (*interest group*). Gereja Katolik sebagai kelompok kepentingan mengajak umat katolik untuk berpartisipasi secara penuh dalam pemilu serentak dan agar umat memiliki padangan politik serta pilihan yang tepat demi terciptanya demokrasi kepemiluan yang baik dan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, dan berpihak kepada rakyat.

Dari kedua konsep tersebut, diuraikan kedalam beberapa fenomena (indikator-indikator) penelitian yang lebih operasional, yaitu :

A. Strategi Pendidikan Politik

- Pendidikan politik dilakukan melalui sarana media massa resmi Keuskupan Agung Semarang yaitu majalah Salam Damai.

- Pendidikan politik dilakukan melalui kelompok-kelompok kategorial umat seperti Orang Muda Katolik (OMK) dan ormas katolik seperti Pemuda Katolik dan WKRI.

B. Bentuk Pendidikan Politik

- Kegiatan sosialisasi di kalangan umat melalui gereja-gereja di Keuskupan Agung Semarang mengenai pendidikan dan sosialisasi politik bagi umat.
- Kegiatan Temu Pastoral sebagai forum resmi gereja ditingkat kevikeyan yang dihadiri semua Romo/Pastur di masing-masing kevikeyan.
- Penyebarluasan Surat Gembala yang dibacakan setiap perayaan ekaristi dan Nota Pastoral yang berisi mengenai sikap gereja terhadap masalah sosial politik.

C. Peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang

- Peran internal

Gereja Katolik melalui berbagai strategi dan bentuk pendidikan politik.

- Peran eksternal

Keterlibatan Gereja Katolik dalam membangun jejaring kerjasama dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk melakukan pencerdasan politik kepada umat katolik mengenai pemilu tahun 2019.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif. Menurut *Krik dan Miller* penelitian kualitatif pada mulanya bersumber dari pengamatan

kualitatif yang dipertentangkan dengan pengamatan kuantitatif. Penelitian kualitatif sendiri merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Metode penelitian kualitatif yang dipilih adalah deskriptif, jika ditinjau dari sifat penelitian, penelitian ini lebih mendalam. Dalam penelitian ini, penulis mengambil studi tentang peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam Pemilu tahun 2019 di wilayah Kota Semarang.

1.7.2. Situs Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah pada Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang di wilayah Kota Semarang.

1.7.3. Subjek Penelitian

Penelitian ini membutuhkan beberapa narasumber atau informan. Informan yang dipilih adalah karena memiliki wawasan serta pandangan luas mengenai peran serta Gereja Katolik pada masa pemilu tahun 2019. Informan didefinisikan sebagai mereka yang berperan dan memiliki pengetahuan luas tentang daerah atau lembaga tempat penelitian.⁴ Berdasarkan karakteristik informan tersebut, maka dipilihlah 20 informan yang terdiri dari 2 informan kunci dan informan pendukung.

Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sample*. *Purposive sample* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan informan pertama merupakan hal yang sangat utama sehingga harus dilakukan secara cermat, karena penelitian ini mengkaji tentang peran gereja katolik Keuskupan Agung Semarang dalam Pendidikan Politik bagi umat di wilayah Kota Semarang menjelang Pemilu tahun 2019. Berikut merupakan beberapa data informan yang akan diwawancarai oleh peneliti:

Tabel 1.2.

⁴ Moleong dan Lexy. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Hlm. 199.

Data Informan dalam Penelitian

No.	Instansi	Jabatan dalam Instansi
1.	Keuskupan Agung Semarang	Vikaris Jenderal (Vikjen) Keuskupan Agung Semarang
2.	Keuskupan Agung Semarang	Ketua PK4AS (Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keskupan Agung Semarang)
3.	PK4AS (Penghubung Karya Kerasulan Kemasyarakatan Keskupan Agung Semarang)	Anggota Aktif PK4AS
4.	WKRI (Wanita Katolik Republik Indonesia) Cabang Kota Semarang	Ketua Umum WKRI Cabang Kota Semarang
5.	KPU Provinsi Jawa Tengah	Komisioner KPU Provinsi Jawa Tengah Bidang Data dan Informasi
6.	Caleg (Parpol Nasdem) Kota Semarang Tahun 2019	Dr. Maria Caecilia Nanny, M.Sc., Apt.
7.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Maria Fatima Banyumanik
8.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Athanasius Agung Karangpanas
9.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Familia Admodirono
10.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja Mater Dei lampersari

11.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Petrus Sambiroto
12.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Paulus Sendangguwo
13.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Fransiskus Xaverius Kebondalem
14.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Yusuf Gedangan
15.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Maria Ratu Rosario Suci Randusari
16.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Theresia Bongsari
17.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Ignatius Krapyak
18.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja St. Mikael Semarang Indah
19.	Dewan Paroki (Bidang III Sosial Kemasyarakatan)	Ketua Bidang III Gereja Katolik Hati Kudus Yesus Tanah Mas
20.	Pemuda Katolik Komisariat Daerah Jawa Tengah	Ketua Pemuda Katolik Komda Jawa Tengah

Sumber: Diolah oleh Peneliti (2019)

1.7.4. Jenis Data

1. Kata-Kata dan Tindakan

Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama, sumber data utama dicatat

melalui catatan tertulis, melalui perekaman video/audio dan pengambilan foto.

2. Sumber Tertulis

Sumber data tambahan yang berasal dari sumber tertulis seperti sumber buku, sumber dari arsip dokumen pribadi dan dokumen resmi yang dikeluarkan Gereja Katolik berupa Nota Pastoral, Ensiklik, dan Surat Gembala. Dokumen-dokumen resmi bisa di dapat dari Kantor Gereja Pusat Keuskupan Agung Semarang.

1.7.5. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari informan melalui pertanyaan yang diajukan saat proses wawancara dan pengamatan yang dilakukan secara langsung. Data ini dapat diperoleh secara langsung dengan mewawancarai Ketua PK4AS, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang dan tim PK4AS serta tokoh umat katolik yang berada di 13 Gereja Kota Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian seperti dokumen-dokumen artikel, media massa, internet dan studi literatur lainnya yang dianggap relevan dengan permasalahan. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi, Nota Pastoral yang dikeluarkan oleh tim Dewan Karya Pastoral, Surat Gembala yang dikeluarkan oleh seorang Uskup, dan buku-buku serta majalah dan artikel penunjang.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data⁵. Dalam penelitian ini, guna memperoleh informasi yang diharapkan, pengumpulan data dilakukan dengan cara melalui wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu data tertentu⁶. Penulis menggunakan tipe wawancara semi terstruktur. Wawancara ini sudah termasuk ke dalam in-dept interview. Wawancara ini lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka. Pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Pada penelitian ini dilakukan wawancara kepada Ketua PK4AS, Vikaris Jenderal Keuskupan Agung Semarang, ormas katolik dan tokoh umat katolik yang berada di Kota Semarang guna mengetahui sejauh mana peran Gereja Katolik Kueskupan Agung Semarang Dalam Pendidikan Politik menjelang Pemilu tahun 2019.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan bukti yang akurat didalam penelitian dimana akan mendukung data tersebut bahwa peneliti telah benar-benar melakukan teknik pengumpulan data melalui beberapa metode yang peneliti susun berdasarkan jawaban narasumber.

1.7.7. Analisis dan Interpretasi Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan prosedur reduksi data sebagai tahap pemilihan data-data penting,

⁵ Beni Ahmad Saebani.(2008).*Metode Penelitian*. Bandung: CV. Pustaka Setia. Hlm. 185.

⁶ *Ibid.*, Hlm. 190

display data sebagai tahap penyajian data, dan menarik kesimpulan (verifikasi). Pada tahapan interpretasi data, data penelitian yang telah dideskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya diinterpretasikan sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai hasil penelitian. Hasil penelitian dijabarkan dengan lengkap pada lampiran. Lampiran penulisan juga ditentukan agar relevan dengan hasil penelitian.

Dalam menganalisis data mengenai peran Gereja Katolik Keuskupan Agung Semarang dalam Pendidikan Politik menjelang pemilu Tahun 2019, peneliti melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi serta literatur sehingga menghasilkan data primer dan sekunder.
2. Setelah dihasilkan data primer dan sekunder peneliti mereduksi data yang diperoleh kedalam bentuk yang lebih sederhana dengan merangkum hasil wawancara. Menentukan pokok-pokok penting sehingga memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil dari pengamatan.
3. Setelah data terkumpul secara rapi, maka data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk uraian teks sehingga peneliti melakukan analisis dan interpretasi menggunakan data tersebut.
4. Setelah itu, peneliti mencoba menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis dan diinterpretasikan sehingga secara lebih jelas akan menciptakan pengetahuan baru tentang objek yang diteliti.

1.7.8. Kualitas Data

Dalam penelitian ini, Teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dengan cara membandingkan data hasil wawancara dan data

hasil pengamatan. Dalam hal ini, triangulasi diperoleh dari narasumber di yang berasal dari kaum awam (umat biasa) dan Caleg katolik.